**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 471.13/1826/SJ TAHUN 2013 TENTANG
PEMANFAATAN E-KTP DENGAN MENGGUNAKAN CARD
READER TERHADAP PRAKTIK FOTOCOPY E-KTP DI DESA
CIBADAK KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS**

Irham Firmansyah ^{*)}

Irham_firmansyah@student.unigal.ac.id

Dewi Mulyanti^{*)}

dewimulyanti28@unigal.ac.id

Hendi Budi Aman^{*)}

hendi_budi Aman@unigal.ac.id

ABSTRACT

Building a digitalized and centralized bureaucratic ecosystem is difficult to realize due to the unpreparedness of supporting facilities and infrastructure. Therefore, this research aims to determine the implementation of public services using a Card Reader in Cibadak Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. This research is limited by identifying the following problems: How is the implementation of the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 471.13/1826/SJ of 2013 concerning the Utilization of E-KTP Using a Card Reader on the Practice of Photocopying E-KTP in Cibadak Village, Banjarsari District, Ciamis Regency, what are the obstacles? faced and the efforts made in utilizing Card Reader as an E-KTP reader in Cibadak Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The research method used by the author is analytical descriptive research, namely describing the description of the data obtained and connecting them to each other to obtain clarity on a truth or vice versa using a normative juridical research approach method. To strengthen the research results, researchers conducted literature studies and field research in the form of observations and interviews. Based on the results of research, the use of E-KTP using a Card Reader in Cibadak Village, Banjarsari District, Ciamis Regency is not working. As a result, several administrative services still use E-KTP photocopies. Obstacles faced include the absence of a strong and clear legal umbrella foundation, the absence of supporting facilities and infrastructure, the limited capacity of Village Apparatus Resources and the culture of village apparatus

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

that is still not adaptive to developments in communication and information technology.

Keywords: *e-KTP, Card Reader, photocopy*

ABSTRAK

Membangun suatu ekosistem birokrasi yang terdigitalisasi dan terpusat sulit untuk terealisasi karena ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung. Maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dengan menggunakan *Card Reader* di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dibatasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP Di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Kendala apa sajakah yang dihadapi serta Upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan *Card Reader* sebagai alat pembaca E- KTP di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Adapun metode penelitian yang dipergunakan penulis berjenis penelitian deskriptis analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Untuk memperkuat hasil penelitian tersebut peneliti melakukan studi pustaka dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan E- KTP dengan menggunakan *Card Reader* di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tidak berjalan. Akibatnya, beberapa pelayanan administrasi masih banyak mempergunakan fotocopy E-KTP. Kendala yang dihadapi diantaranya ketiadaan landasan payung hukum yang kuat dan jelas, ketiadaan sarana dan pra-sarana pendukung, kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa yang masih terbatas serta budaya aparatur desa yang masih belum adaptif dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Kata Kunci : e-KTP, *Card Reader*, *fotocopy*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada *good governance*. Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *E-Government*. Salah satu tujuan implementasi *E-Government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik

Peranan administrasi publik di masa depan merupakan kajian prospektif yang memperhitungkan tuntutan dan perkembangan lingkungan administrasi publik, yang secara terus-menerus akan mengalami perubahan dalam arti perkembangan, sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi dan

komunikasi yang berlangsung secara global dan langsung mempengaruhi lingkungan administrasi.¹⁾

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengisyaratkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wujud dari penerapan *E-Government* dalam pelayanan E-KTP menjadi penting. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional dalam Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan:

Tujuan pemerintahan menerbitkan KTP elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional E-KTP merupakan cara tepat yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya.

Realita yang terjadi wacana untuk membangun suatu ekosistem birokrasi yang terdigitalisasi dan terpusat sulit untuk terealisasikan. Sebab hal yang menyangkut aspek pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini belum dapat dikategorikan mencapai tujuan yang signifikan.

Konsekuensi dari ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung tersebut berdampak pada langgengnya praktik fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang seringkali dipergunakan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk

¹⁾ Wempy Banga. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. hlm. 165.

mendapatkan pelayanan administrasi maupun untuk melengkapi persyaratan dari berbagai macam program pemerintah.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan alasan masih banyaknya lembaga atau instansi pelayanan publik meminta warga memfotocopy E-KTP atau KTP elektronik saat mengurus sesuatu. Hal ini lantaran masih banyak instansi pelayanan publik yang belum memiliki fasilitas alat pembaca kartu atau *Card Reader*. Minimnya fasilitas ini menyebabkan warga masih saja dibebankan untuk memfotocopy E-KTP. Zudan pun mengingatkan kembali, bahwa fisik E-KTP tidak hanya sekadar kartu bertuliskan identitas warga. Namun di dalamnya terdapat perangkat elektronik yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi.²⁾

Menanggapi kondisi tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No. 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP dengan Menggunakan *Card Reader* Poin 3 menjelaskan bahwa:

Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfotocopy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik E-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik E-KTP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimanakah implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP dengan menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP dengan menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan Implementasi Surat Edaran Menteri

²⁾ Liputan 6. 2021. *Ini penyebab Masih Banyak Lembaga Minta Fotokopi E-KTP*. Diakses 25 Agustus 2023. Doi: <https://www.liputan6.com/news/read/4580461/ini-penyebab-masih-banyak-lembaga-minta-fotokopi-e-ktp>.

Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP dengan menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan

³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.

alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.⁴⁾

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Rozali, dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ialah:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
Kewenangan desa berdasarkan hal asal usul sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Sistem organisasi masyarakat desa
 2. Pembinaan Kelembagaan masyarakat
 3. Pembinaan lembaga dan hukum adat
 4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
 5. Pengembangan peran masyarakat Desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota

⁴⁾ Mashuri Mashab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov. hlm. 1- 2

- d. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁵⁾

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *openness* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *openness* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.⁶⁾

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spriritualitasnya.⁷⁾

Pada umumnya, ahli mengartikan *good governance* dengan pemerintahan yang bersih atau *clean government*. Hal ini mengarah pada pemerintahan bersih dan berwibawa, menunjukkan suatu pemikiran awal, tentang *good governance*

⁵⁾ Abdullah Rozali. 2017. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 170.

⁶⁾ Arifin Tahir. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Gorontalo*. Jurnal Akuntansi, Volume XVI. Diakses 23 Agustus 2023. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/74983-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implemen.pdf>

⁷⁾ A.Ubaedillah. 2015. *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenamedia Group. hlm. 210-211

sebagai paradigma baru administrasi/ manajemen pembangunan. *Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan/ manajemen pembangunan menempatkan peran sentral pemerintah. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat (*developing*) dalam negara berkembang *agent of change* dan karena perubahan yang dikehendaki.⁸⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

3.2. Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Elektronik-KTP atau E-KTP adalah sebuah kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda pengenal bahwa penduduk tersebut adalah penduduk Indonesia. Program E-KTP ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2009 berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP NIK secara nasional. E-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dan dimasukkan ke sebuah chip *smart card*. Di dalam E-KTP terdapat *secure access module* (SAM) yang berupa 4 bytes UIDs (*Unique Identifier*) dalam range 10 digit. E-

⁸⁾ Lilin Budiati. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 33.

KTP terbuat dari bahan PETG semacam polimer termoplastik yang tersusun dalam 7 lapisan. E-KTP dilengkapi chip antarmuka nirsentuh (*contactless*) yang memenuhi standar ISO 14443 A/B dengan transmisi data melalui gelombang radio (RF).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berdasarkan NIK Secara Nasional, dijelaskan bahwa KTP berbasis NIK yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (E-KTP) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Pasal 1 angka 3). Kartu tanda penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman Elektronik dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu tanda penduduk Elektronik merupakan:

- a. Identitas resmi bukti domisili penduduk.
- b. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah.
- c. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertahanan

Membaca kartu memori atau alat untuk membaca kartu memori. *Card reader* biasanya di hubungkan ke komputer dengan kabel USB. USB berfungsi untuk mengakses data pada kartu memori. Pada awalnya pembaca kartu memori dirancang hanya untuk membaca satu jenis kartu memori saja, seiring majunya teknologi. Kini banyak *card reader* yang dapat membaca berbagai jenis kartu memori. Alat ini sering disebut dengan *Multicard reader*. Untuk membaca chip E-KTP diperlukan perangkat pembaca atau *card reader*. *Card Reader* membutuhkan standar teknis tertentu untuk bisa

berkomunikasi dan membaca data chip secara aman. Kelebihan E-KTP yang dibaca via E-KTP *reader* setidaknya ada dua hal tapi dibaca dengan E-KTP *Reader*, ada mekanisme yang memungkinkan *reader* hal yang demikian bisa segera mendeteksi apakah kartu E-KTP itu valid atau tidak. Dengan demikian, upaya untuk membuat E-KTP palsu yang contohnya saja sepiantas dari luar seperti asli, akan segera ketahuan. Fitur ini sekaligus menampakkan bahwa NIK dan identitas yang dicetak pada kartu E-KTP itu adalah identitas resmi penduduk hal yang demikian, dan juga sekaligus tunggal. Karena fitur ini masih belum bisa menjawab, apakah E-KTP itu dibawa oleh orang yang bersangkutan, ataukah dibawa oleh orang lain.

E-Government merupakan kepanjangan dari *Electronic Government*. *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan keuangan pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *Electronic Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) *E-Government* adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh sektor publik yang diterapkan di beberapa fungsi pemerintahan. Potensi dari TIK tersebut memiliki peluang untuk mengubah struktur dan operasional pemerintah. Sedangkan menurut Bank Dunia bahwa *E-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Adapun yang menjadi tujuan daripada *Electronic Government* diantaranya:

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

2. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

3.3. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP Di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dijelaskan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek. *Pertama, E-Leadership*. Aspek ini

berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *Kedua, Infrastruktur Jaringan Informasi*. Aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. *Ketiga, Pengelolaan Informasi*. Aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya. *Keempat, Lingkungan Bisnis*. Aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar

masyarakat. *Kelima*, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dijelaskan bahwa E-KTP merupakan KTP yang dirancang secara elektronik dengan spesifikasi dan bentuk tertentu dan berlaku seumur hidup. Pelayanan E-KTP kepada masyarakat, dibutuhkan sistem Administrasi Kependudukan. Sistem Administrasi Kependudukan yang saat ini berjalan di setiap daerah terbentuk sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu E-KTP dapat dibaca dengan menggunakan pembaca kartu. *Card Reader* membutuhkan standar teknis tertentu untuk dapat berkomunikasi dan membaca data *chip* secara aman.

Untuk membaca *chip* E-KTP diperlukan perangkat pembaca atau *Card Reader*. *Card reader* memerlukan standar teknis tertentu untuk dapat berkomunikasi dan membaca data chip secara aman. Kelebihan E-KTP yang dibaca lewat *Card Reader* setidaknya ada 2 (dua) hal:

1. Jika dibaca dengan *Card Reader*, ada mekanisme yang memungkinkan reader tersebut bisa langsung mendeteksi apakah kartu E-KTP itu valid atau tidak. Dengan demikian, upaya untuk membuat E-KTP palsu yang misalnya saja sepintas dari luar seperti asli, akan segera ketahuan. Fitur ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK dan identitas yang dicetak pada kartu E-KTP itu adalah identitas resmi penduduk tersebut, dan juga sekaligus tunggal. Tetapi fitur ini masih belum bisa menjawab, apakah E-KTP itu dibawa oleh orang yang bersangkutan, ataukah dibawa oleh orang lain.
2. *Card Reader* bisa memastikan apakah kartu itu dibawa oleh orang yang identitasnya tertulis di kartu E-KTP. Karena *Card Reader*

dilengkapi dengan modul biometrik sidik jari, yang meminta user untuk meletakkan jarinya pada *scanner*, dan selanjutnya *Card Reader* akan membandingkan kemiripan karakteristik sidik jari yang bersangkutan dengan data sidik jari yang sudah direkam. Tata cara dasar alur penggunaan *Card Reader* merupakan wewenang kebijakan Kemendagri.

Dalam hal ini, Peraturan Presiden tersebut sudah disebarluaskan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tahun 2011. Dengan demikian, pemberitahuan kewajiban penyiapan *Card Reader* tersebut tidak terlambat. Pengadaan *Card Reader* tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing instansi terkait, dengan tujuan agar *chip* E-KTP dapat dibaca dan dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya *Card Reader*, maka lembaga pelayanan publik bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di pihak lain, lembaga pelayanan publik, misalnya perbankan, tidak dimungkinkan lagi dibohongi oleh oknum nasabah dengan menggunakan identitas palsu.

Substansi utama dalam Surat Edaran Mendagri tersebut adalah mengingatkan amanat Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 10C kepada para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia/para pimpinan bank, para Gubernur, para Bupati/Walikota untuk memfasilitasi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyediakan card reader dengan maksud agar tujuan program E-KTP dapat terwujud. Larangan memfotocopy E-KTP, ditujukan kepada lembaga pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat pemilik E-KTP. Larangan mem-otocopy E-KTP bagi lembaga pemerintah dan swasta yang melayani masyarakat bukan karena kualitas *chip* E-KTP rendah atau mudah rusak, karena E-KTP yang diterapkan di Indonesia sudah memenuhi standar internasional, akan tetapi larangan tersebut bertujuan untuk menghindari/mencegah kerusakan *chip* E-KTP dalam jangka waktu panjang, dimana masa berlaku E-KTP direncanakan akan dirubah masa berlakunya dari 5 (lima) tahun menjadi berlaku seumur hidup melalui perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mencegah kemungkinan pemalsuan, karena fotocopy E-KTP sangat dimungkinkan untuk dipalsukan, mengingat dalam fotocopy E-KTP tidak ada lagi *chip*.

Selain itu, penyediaan *Card Reader* sebagai pengganti fotocopy E-KTP bertujuan agar E-KTP dapat memberikan manfaat supaya tidak dimungkinkan lagi dipalsukan serta mendukung unit kerja pelayanan

publik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta melindungi unit kerja pelayanan publik terhindar dari oknum-oknum yang merencanakan tindakan yang merugikan unit kerja tersebut dari pemalsuan identitas.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* masih belum dapat dilaksanakan baik secara yuridis maupun teknis.

Setelah hampir 10 tahun berlaku, ternyata E-KTP masih difotocopy. Demikian juga dengan *Card Reader*, belum semua lembaga pelayanan publik memiliki alat tersebut sepertihalnya yang terjadi di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Dalam surat edaran tersebut terdapat himbauan untuk menjaga dan merawat dari segi fisik karena di dalam E-KTP terdapat chip yang memuat data biodata, rekaman sidik jari, iris mata, tanda tangan dan foto warga.

Sampai saat ini pemanfaatan data yang tersimpan dalam *chip* di E-KTP tersebut masih belum dapat digunakan, baik oleh instansi pemerintah, maupun instansi swasta. Sehingga untuk beberapa kepentingan digunakan copy dari E-KTP yang sebenarnya tidak disarankan oleh pemerintah, bahkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 471.13/1826/SJ tentang Pemanfaatan E-KTP dengan menggunakan *Card Reader*, dituliskan bahwa E-KTP tidak diperkenankan untuk difotocopy, dan bagi yang unit kerja yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memfotocopy akan diberikan sanksi. Walaupun kemudian surat edaran ini banyak diabaikan secara praktiknya di lapangan.

3.4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP Di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Kemendagri melarang -nya E-KTP fotocopy karena dapat merusak sistem *chip* yang tertanam di dalamnya, kini realisasi mesin *Card Reader* untuk membaca data dari E-KTP akan segera terwujud dalam waktu dekat. Beberapa tahun setelah Surat Edaran tersebut diterbitkan larangan ini cukup menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya ada yang menganggap bahwa pengadaan *Card Reader* menjadi salah satu pemborosan. Di sisi lain juga ada yang menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan Kemendagri terlambat.

Permasalahan yang terjadi adalah penerapan teknologi informasi saat ini kurang selaras dengan tujuan *E-Government* yang berbasis pada digitalisasi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan. Penerapan teknologi informasi harus direncanakan dan ditata kelola dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tata kelola TI memudahkan organisasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi.

Menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan *Card Reader* di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih mengalami beragam kendala yang bersifat kompleks sebagai berikut:

Pertama, karena ketiadaan landasan payung hukum yang kuat dan jelas. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila kita melihat pada aspek yuridis penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik dengan memanfaatkan alat pendukung berupa *Card Reader* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013

tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader*. Semestinya apabila Pemerintah Pusat memang berkeinginan untuk mengimplementasikan substansi dalam Surat Edaran tersebut secara efektif dan terukur maka seyogyanya perlu bahan pertimbangan untuk merevisi Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan memasukan materi-materi yang ada dalam Surat Edaran tersebut ke dalam Undang-Undang nantinya baik terkait dengan hal-hal teknis, alokasi anggaran hingga sanksi-sanksi.

Kedua, ketiadaan sarana dan pra-sarana pendukung. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Desa Cibadak atau mungkin hampir semua Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis belum memiliki peralatan tersebut. Karena memang sedari awal kami belum mengetahui Surat Edaran tersebut dan tidak ada pembicaraan atau pembahasan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis maupun Pemerintah Pusat menyangkut pengalokasian anggaran pengadaan alat pembaca E-KTP (*Card Reader*).

Ketiga, menyangkut dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa yang masih terbatas serta budaya aparatur desa yang masih belum adaptif dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tak dipungkiri bahwa tidak sedikit dari pegawai kami yang belum mafhum teknologi terlebih para pegawai yang tergolong berusia tua. Oleh karenanya, kami sangat terbantu sekali dengan adanya beberapa pegawai yang berusia produktif dan masih muda, secara mereka lebih terbuka akan perkembangan teknologi dalam membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi publik di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Serba keterbatasan akan kendala dan tantangan kompleks yang dihadapi, kami selalu berupaya untuk tetap bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar senantiasa dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya warga Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis secara

optimal.

3.5. Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan Card Reader Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP Di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Mengatasi kendala yang dihadapi oleh Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tersebut pemerintah pusat dan daerah harus seyogyanya mampu melakukan suatu terobos yang visioner dalam membentuk dimensi baru ke dalam sistem pemerintah, manajemen kerja, pengalokasian anggaran yang jelas dan terarah serta proses kerja yang relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Adapun kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti merekapitulasi dan memperbaharui data identitas masyarakat guna menimalisir praktik fotocopy E-KTP bagi masyarakat di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis agar tidak lagi harus melampirkan fotocopy E-KTP dalam memanfaatkan layanan administrasi serta melakukan upaya lain dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran bagi aparatur desa guna meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya selama menyelenggarakan pelayanan publik.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* merupakan inovasi sekaligus komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi dan transformasi dalam sektor penyelenggaraan pelayanan publik yang

mensinergikan peran teknologi dan informasi sebagai bagian terciptanya ekosistem *electronic government* namun dalam praktiknya di lapangan bahwa pemanfaatan alat pembaca E-KTP (*Card Reader*) di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* belum dapat diimplementasikan secara efektif yang diakibatkan oleh ketiadaan faktor pendukung sehingga masih perlu adanya pengkajian ulang, evaluasi dan pembenahan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan pemanfaatan *Card Reader* dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tidak terimplementasi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya: ketiadaan landasan payung hukum yang kuat, jelas dan mengikat yang terjadi akibat penerbitan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader*, Ketersediaan fasilitas, tempat, akses internet, sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* tersebut dan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih terbatas serta budaya aparatur desa yang masih belum adaptif dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Upaya yang dilakukan mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader* Terhadap Praktik Fotocopy E-KTP Di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis diantaranya harus dilakukan secara komprehensif

dan menyeluruh oleh berbagai pihak diantaranya Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta semua perangkat Pemerintahan Desa seperti penyempunaan di parlemen terkait dengan kendala yuridis dan Memperbaharui data identitas masyarakat guna menimalisir praktik fotocopy E-KTP bagi masyarakat di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis agar tidak lagi harus melampirkan fotocopy E-KTP dalam memanfaatkan layanan administrasi serta melakukan upaya lain dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran bagi aparatur desa guna meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya selama menyelenggarakan pelayanan publik.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Bagi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebaiknya melakukan pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja, kualitas dan profesionalitas para pegawai teknis khususnya menyangkut sistem teknologi serta didukung dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki pengaruh yang sangat besar guna mewujudkan ekosistem pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Bagi masyarakat jika ingin memperbanyak E-KTP, padahal untuk sementara ini E-KTP belum berfungsi secara optimal, khususnya apabila Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih menyaratkan fotocopy E-KTP dan belum tersedianya *Card Reader* untuk membaca E- KTP. Solusinya antara lain masyarakat dapat

memfotocopy E-KTP 1x saja, bila ingin memperbanyak tinggal memperbanyak fotokopian pertama kali tadi. Kemudian masyarakat bisa men-*scan* E-KTP pribadinya, sehingga masyarakat bisa punya file *softcopy* nya. Jika ingin menyetak/ memperbanyak anda bisa mencetaknya dengan kualitas hasil kopian yang tetap bagus seperti ketika difotocopy pertama kali.

3. Bagi legislatif sebaiknya dalam membuat aturan untuk mengkaji ulang kebijakan pemanfaatan alat *Card Reder* untuk membaca E-KTP bersama dengan DPR-RI, untuk membahas kembali menyangkut soal alokasi anggaran pengadaan alat Card Reader dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas pengawasan dan proporsional serta penyusunan ulang aspek yuridis yang lebih kuat, tidak hanya sebatas Surat Edaran melainkan berbentuk Undang-Undang agar daya ikat dan memaksanya jauh lebih kuat dan terlaksana. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus berkoordinasi dengan kementerian terkait sampai dengan Kepala Daerah untuk membahas salah satu kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan alat digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Banga, Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mashuri Mashab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov
- Rozali, Abdullah. 2017. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 170.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ubaedillah, A. 2015. *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenamedia Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tentang Pemanfaatan E-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader*.

C. Sumber Lainnya

- Arifin Tahir. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Gorontalo*. Jurnal Akuntansi, Volume XVI. Diakses 23 Agustus 2023. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/74983-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implemen.pdf>
- Liputan 6. 2021. *Ini penyebab Masih Banyak Lembaga Minta Fotokopi E-KTP*. Diakses 25 Agustus 2023. Doi: <https://www.liputan6.com/news/read/4580461/ini-penyebab-masih-banyak- lembaga-minta-fotokopi-e-ktp>.